

---

## Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)

Virginia V. Rumawas<sup>1</sup>

Herman Nayoan<sup>2</sup>

Neni Kumayas<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Ketahanan Pangan merupakan sebuah sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah bahkan suatu negara, karena ketahanan pangan merupakan sumber bahan pokok bagi masyarakat. Dalam rangka mengembangkan sektor tersebut, peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ada dua aspek yakni 1) Operasi langsung, Pemerintah terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan (sustainability). 2) Aspek pengendalian langsung, Dinas pangan selalu mengontrol kondisi pangan minahasa selatan, juga melakukan antisipasi kerawanan pangan dengan melakukan import beras di luar daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten minahasa selatan, informan yang digunakan merupakan informan yang di pilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian peneliti melibatkan informan-informan yang di pilih terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengklarifikasikan informan ke dalam dua jenis yaitu key informan dan secondary informan dimana key informan atau informan kunci peneliti adalah pelaku yang terlibat dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten minahasa selatan dalam penelitian ini key informan diharapkan dapat menjawab terkait dengan ketahanan pangan yang di maksud. Sedangkan secondary informan atau informan peneliti melibatkan pihak kelompok tani dan masyarakat. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Minahasa Selatan telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur. Selanjutnya perlu adanya perbaikan dalam system pengawasan yakni melakukan evaluasi berkala dan system inspeksi mendadak agar mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar masalah serta pemecahan masalahnya.

**Kata kunci : Peran, Pangan, Pertanian**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Indonesia adalah Negara agraris yang dimana hampir semua daerah mampu membuka lahan pertanian sebagai tempat dalam bercocok tanam untuk semua jenis produk pertanian, hal ini tentunya membuat sektor pertanian di Indonesia ditumbuhi oleh berbagai jenis produk unggulan pertanian dimana menghasilkan produk pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia haruslah mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri sehingga menghasilkan ketahanan pangan yang memadai.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu Negara, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting karena sektor ini menjadi penyedia pangan utama, terlebih bagi negara yang sedang berkembang, karena memiliki peran ganda yaitu sebagai salah satu sasaran utama pembangunan dan salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan fluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan ketahanan pangan di berbagai sektor unggulan produksi pertanian.

Saat ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun terbukti data Badan Pusat Statistik merilis bahwa angka pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2018 mencapai 260 juta jiwa. Hal ini berimplikasi pada konsumsi pangan terlebih khusus pada konsumsi beras yang semakin banyak, dari data Badan Pusat Statistik tembus diangka 124 Kg Perkapita pertahun 2018. Melihat angka tersebut membuktikan bahwa laju pertumbuhan

penduduk beriringan dengan laju konsumsi pangan yang semakin besar tentu berdampak pula pada ketersediaan lahan pertanian sebagai sumber produksi kebutuhan pangan.

Provinsi Sulawesi Utara Sebagai salah satu daerah agraris yang mempunyai potensi tinggi terhadap sektor pertanian, justru Sulawesi Utara masih mengalami masalah ketersediaan pangan. Hal itu terlihat pada masalah pembangunan pedesaan dan sektor pertanian. Cerminan itu dapat digambarkan bahwa daerah Provinsi Sulawesi Utara saat ini sedang mengalami transisi pembangunan infrastruktur jalan, pabrik serta perkantoran. Secara langsung membuktikan bahwa hal ini justru mendorong defisit lahan garapan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan lokal.

Seperti halnya di Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam khususnya sektor agraris sebagai leading sektor pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 2015-2019 menuangkan kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian. Dalam arti luas di kabupaten Minahasa Selatan mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dibalik kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian itu justru tersimpan fakta yang berbelok arah dengan realitas dilapangan. Gambaran itu dapat di uraikan dengan Permasalahan kebutuhan pangan yang dihadapi saat ini di Minahasa Selatan khususnya di Kecamatan Tompaso Baru Desa Lindangan, Kecamatan Tatapan Desa Bajo, Kecamatan Maesaan Desa Lowian

yakni Pertama, Masalah keterbatasan lahan pertanian karena jumlah penduduk yang semakin bertambah luas menyebabkan sektor pertanian semakin mengecil setiap tahun. Situasi ini sangat berdampak terhadap penurunan produksi pertanian terutama pangan (beras) padi. Kurangnya intensifikasi pada lahan kering atau lahan basah, dan belum efektifnya pengembangan padi pasang surut, demikian juga pada tanaman palawija yang masih dibudidayakan dalam skala kecil yang berimplikasi pada kurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan factor kemiskinan, Karena masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan rata-rata mata pencahariannya adalah petani. Kedua, Masalah Stabilitas harga pangan. Ketersediaan dan stabilitas harga pangan sangat penting untuk terus di pantau dari waktu ke waktu karena dapat mengakibatkan pada minimnya jumlah produksi hasil pertanian seperti padi, jagung dan umbi-umbian. Tentunya jika hal ini dibiarkan akan mempengaruhi pada produktivitas sumber kebutuhan pangan sehingga semakin defisit jumlah ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut memberikan signal kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya dinas Ketahanan pangan Kabupaten Minahasa Selatan agar dapat mengambil peran penting dalam menentaskan masalah Sektor pertanian sebagai sumber produksi Ketahanan pangan. Maka dari itu sehubungan dengan uraian latar belakang masalah diatas dapat dipahami bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan tercapainya tujuan ketahanan pangan daerah yaitu Ketersediaan pangan yang mencakup produksi, cadangan dan pemasukan, Distribusi/aksesibilitas serta Konsumsi mencakup mutu dan keamanan pangan. Untuk itu berdasarkan latar belakang

masalah diatas Peneliti tertarik Membahas lebih dalam Mengenai “*Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan)*”

## Kajian Pustaka

### A. Konsep Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa. Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan social. (Soekanto 2010: 2)

Peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak. Rivai (2012: 148)

Bintoro (2011:19) Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan 2 macam cara:

1. Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan

sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.

2. Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action ladern” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action ladern.

### B. Pemerintah

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. S.H. Sarundajang (2009:5) Pemerintahan adalah Besctuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan. Ridwan HR (2009:2). Fungsi pemerintah yang utama adalah pengadakan pelayanan publik (Lauma, Pangemanan, Sampe 2019).

Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara. Bagir Manan (2009:101).

Menurut W.S Sayre (2011) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (2010), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

### C. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad millennium ini. Apabila melihat penjelasan PP 68/2009 tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan local yang mengandung keragaman antar daerah. Bustanul Arifin (2009).

Ketahanan Pangan merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan dimana rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Pencapaian ketahanan pangan di Indonesia terkait dengan salah satu tujuan UUD 1945 dalam alinea keempat yaitu mencapai kesejahteraan umum. Hal tersebut berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas, dan akses terhadap pangan-pangan utama. FAO (2012).

Ketahanan Pangan merupakan kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang saat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Makna yang terkandung dalam ketahanan pangan mencakup dimensi fisik (ketersediaan), ekonomi (daya beli), gizi (pemenuhan kebutuhan gizi individu), nilai

budaya dan religious, keamanan pangan (kesehatan), dan waktu (tersedia secara berkesinambungan). Martiano & Hardinsyah 2012).

Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah mutunya, aman merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya local. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistemketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, maupun keamanannya. Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 7 Tahun 2009).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 18 Tahun 2012)

Pangan merupakan kebutuhan paling utama bagi setiap manusia untuk di konsumsi setiap harinya untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan maka diperlukan ketahanan pangan. Berdasarkan UU No. 18/2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai perseorangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Terdapat dua tipe ketidaktahanan pangan dalam rumahtangga yaitu kronis dan transitory. Ketidaktahanan pangan kronis sifatnya menetap, merupakan ketidakcukupan pangan secara menetap akibat ketidakmampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan biasanya kondisi ini diakibatkan oleh kemiskinan. Ketidaktahanan pangan transitory adalah penurunan akses terhadap pangan yang sifatnya sementara, biasanya disebabkan oleh bencana alam yang berakibat pada ketidakstabilan harga pangan, produksi dan pendapatan. Setiawan dalam Kartika (2010:2)

Ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Purwaningsih (2009:3) yaitu:

1. Ketersediaan pangan Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan dalam negeri harus diupayakan melalui produksi dalam negeri dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk.
2. Kemandirian pangan Kemandirian pangan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain.
3. Keterjangkauan pangan Keterjangkauan pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan.

4. Konsumsi pangan Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Moleong (2007:6) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan dan suatu study di dinas ketahanan pangan. Dengan obyek penelitian adalah peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan beserta sumber- sumber lainnya. Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini akan di fokuskan pada Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan pendekatan teori Peran Pemerintah dari Bintoro (2009:19) menyatakan bahwa Peran adalah campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan Pembangunan masyarakat yang dapat dilakukan dengan dua macam cara yakni Operasi langsung dan Pengendalian Langsung.

### **Pembahasan**

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2021 yang difokuskan pada

peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Dalam pembahasan penelitian ini akan di kaji pada dua aspek tunggal dalam fokus penelitian dengan landasan kajian teori Peran Pemerintah dari Bintoro (2009:19). Menyatakan bahwa Peran adalah campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan Pembangunan masyarakat yang dapat dilakukan dengan dua macam cara yakni Operasi langsung dan Pengendalian Langsung.

#### **A. perasi Langsung**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan sebagian besar pangan berasal dari hasil pertanian.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan Mengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan maka negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman,

bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Kerja-kerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Selatan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Minahasa Selatan, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/OT.140/12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu : Ketersediaan dan Cadangan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Mengacu pada hal diatas, dalam konteks ketahanan pangan di Minahasa Selatan dilihat pada aspek operasi langsung, peneliti berpendapat dengan menyimak hasil wawancara terlihat ada beberapa hal yang masi kurang efesien yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pangan, yakni dinas pangan tidak dapat mengakomodir keluhan dari masyarakat dan kelompok tani mengenai harga produksi pangan yang mura, tidak adanya penyediaan bibit atau pupuk serta lahan bagi petani. Dalam konteks mengendalikan atau menjaga stabilitas pangan di Minahasa Selatan maka seharusnya pemerintah lewat dinas pangan mampu bekerja sama dengan pihak lain terutama dinas pertanian dalam rangka membantu kelompok tani untuk memberikan setiap kebutuhan yang berhubungan dengan sarana dan

prasarana produksi di sektor pertanian, karena tidak dipungkiri bahwa konsumsi pangan terbesar di Minahasa Selatan adalah hasil produksi dari sektor pertanian.

Lebih lanjut, Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan, merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan, disebabkan: (a) terbatasnya fasilitas untuk mendukung transparansi informasi pasar; dan (b) terbatasnya kemampuan lembaga pemasaran dalam pengelolaan usahanya. Penurunan harga komoditas pangan pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar, harga pangan meningkat tinggi dan menekan konsumen. Selain itu juga distribusi bahan pangan masih sering mengalami kendala disebabkan karena infrastruktur yang kurang memadai.

Pembinaan distribusi dan harga pangan oleh Dinas Pangan, melalui pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan; penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis serta hasil kajian distribusi dan harga pangan, yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik. Sedangkan peran kelembagaan masyarakat untuk mendorong stabilisasi dan distribusi pangan di daerah sentra pangan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal menjaga stabilitas ketahanan pangan di Minahasa Selatan dilihat pada aspek Operasi Langsung maka secara keseluruhan sebagaimana yang di maksud oleh Bintoro (2011:19) Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu dengan maksud pemerintah lewat dinas pangan hadir memberikan solusi dari masalah

pangan di Minahasa Selatan, belum dapat dikatakan memadai karena masi banyak kebutuhan masyarakat yang belum diakomodir.

## **B. Pengendalian Langsung**

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu: sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, serta sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, dan sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan



pangan Minahasa Selatan secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif dan memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability). Dengan demikian setiap pelaksanaannya dapat lebih terarah, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2016–2021. Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan Renstra Dinas Pangan Kementerian Pertanian RI.

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Selatan, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut: Ketahanan Pangan dan Pertanian Lingkungan, Hidup Kemiskinan dan Kerjasama antar daerah. Lebih lanjut Dalam rangka pemantapan ketersediaan pangan diupayakan pula melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat yang dijabarkan dalam rencana strategis Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016-2021 berupa pengembangan lumbung pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Pengembangan lumbung pangan merupakan upaya pengembangan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di pedesaan pada saat musim paceklik. Upaya yang dilakukan melalui revitalisasi

lumbung pangan masyarakat, dimaksudkan untuk:

- a. Memfasilitasi masyarakat dalam stabilisasi penyediaan pangan.
- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lumbung pangan untuk menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan.
- c. Mengembangkan sumber pendapatan bagi keluarga petani
- d. Mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup.

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan terlihat apa yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Minahasa Selatan belum terimplementasikan dilapangan. Seperti yang disampaikan oleh kelompok tani dan masyarakat bahwa pemerintah pada konteksnya adalah dinas pangan belum melakukan sosialisasi mengenai stabilitas ketahanan pangan. Hal itu tergambarkan pada keluhan kelompok tani dan masyarakat bahwasanya dinas tidak memberikan sarana prasarana seperti pupuk, bibit dan lahan garapan. Hal lain pula dikeluhkan karena masalah stabilitas harga produksi pertanian yang tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran.

Dalam konteks pengendalian langsung dinas pangan Minahasa Selatan hanya melakukan survei harga dan ketersediaan pangan di pasar sedangkan untuk menjangkau di daerah pedesaan sebagaimana sumber lumbung produksi pangan belum di tersentuh, oleh sebab itu peneliti mengatakan bahwa upaya pengendalian pangan hanya secara sentralistik, lebih lanjut upaya dalam pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan oleh dinas pangan adalah dengan mengimpor beras dari luar daerah

guna mengantisipasi kerawanan pangan. Seharusnya pemerintah lewat dinas pangan mampu memberdayakan potensi sumber daya lokal sebagai langkah paling strategis dalam mengendalikan kerawanan pangan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara, Seperti memberikan sarana prasarana, pelatihan, dan mempromosikan produksi lokal sebagai komoditi pangan yang unggul. Sehingga berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam konteks pengendalian langsung oleh dinas pangan Minahasa Selatan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah, belum terlaksana sebagaimana yang terjabarkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pangan 2016-2021. Dan dapatkan disimpulkan pula bahwa teori peran pemerintah oleh Bintoro (2011:19) poin Pengendalian langsung (direct control) yang pada esensinya pemerintah adalah berusaha untuk menjadi action lader dalam tugas pokok dan fungsi, belum terlaksana sebagaimana yang dimaksud. Dinas pangan Kabupaten Minahasa Selatan hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan cara sentralistik (pasar/impor) tetapi tidak menjangkau sentra produksi pangan pedesaan.

### **C. Faktor-Faktor Operasi Langsung dan Pengendalian Langsung**

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Selatan, sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak tantangan yang merupakan peluang yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan,

penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Ketahanan pangan pada tatanan wilayah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan sumberdaya berbasis keragaman sumberdaya lokal.

Kemiskinan berhubungan erat dengan masalah kerawanan pangan. Meningkatnya jumlah penduduk miskin memberikan indikasi meningkatnya jumlah penduduk yang rentan terhadap rawan pangan. Hasil analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi Kecamatan-kecamatan yang termasuk prioritas 1 (resiko tinggi rawan pangan dan gizi) terbanyak pada daerah-daerah pedalaman/pesisir, hal ini disebabkan daerah-daerah tersebut rentan terhadap ketersediaan pangan pokok yang sebagian besar mengandalkan pasokan dari luar, dan tingginya persentase Keluarga Miskin. Penduduk miskin masih didominasi penduduk pedesaan. Tingginya kemiskinan yang menyebabkan masyarakat di pedesaan rentan terjadinya kerawanan pangan. Oleh karena itu dalam konteks menjawab kondisi ketahanan pangan yang masi memiliki potensi permasalahan kerawanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dari pada itu peneliti perlu mengetahui mengenai faktor-faktor atau tantangan dalam pengendalian kerawanan pangan di Minahasa Selatan.

Dari hasil wawancara peneliti bahwa menunjukan masalah pangan berkaitan dengan produksi lokal seperti beras yang masi kurang serta juga pengelolaan pangan oleh masyarakat secara kelembagaan belum berkembang secara baik. minimnya tenaga penyuluh lapangan dalam pembinaan pangan serta

sarana dan prasarana infrastruktur dan petensi sumber daya lokal masi belum memadai.

### Penutup

Kabupaten Minahasa Selatan sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam khususnya sektor agraris sebagai sektor pembangunan daerah. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Peran yang dilakukan Dinas pangan Kabupaten Minahasa Selatan dalam mewujudkan ketahanan pangan belum memadai. Sebagai contoh operasi langsung ke sentra produksi pangan lokal atau pedesaan belum dilakukan secara rutin, Hal demikian terjabarkan pada keluhan kelompok tani dan masyarakat mengenai ketersediaan sarana dan prasarana seperti pupuk, bibit dan lahan garapan. masalah pangan di Minahasa Selatan, dikatakan masi cukup kompleks karena masi banyak kebutuhan pangan masyarakat yang belum diakomodir. Pengendalian Langsung Dinas pangan sudah berupaya mengantisipasi kerawanan pangan dengan cara mengimpor pangan berupa beras dari luar daerah. Tetapi di sisi lain dinas pangan tidak memanfaatkan potensi sumber daya lokal sebagaimana terjabarkan pada Rencana Strategis Dinas Pangan 2016-2021 Kendala dalam menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Minahasa Selatan adalah karena terbatasnya Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastuktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan serta juga Terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan.

### Daftar Pustaka

Anonim 2012, *Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.*

Anomin 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 tentang Ketahanan pangan.*

Anonim 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 tentang Ketahanan Pangan Nasional.*

Darwanto, Dwidjono H. 2012, *Konsep Ketahanan Pangan.* MMA-UGM Yogyakarta, Ilmu Pertanian.

Djopari dan Solihah, Ratna 2008, *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Khambali, I 2016, *Manajemen Penanggulangan Bencana.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Koentjaraningrat, Erlangga 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: PT. Rineka Cipt

Kuncoro, Mudjarad 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah.* Jakarta: Penerbit

Lauma, R., Pangemanan, S., & Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

Moehar, Daniel 2004, *Pengantar Ekonomi Pertanian.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ndraha, T. 2005, *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Nurman 2016, *Konsep Pemerintahan.* Jakarta Pt. Raja Grafindo.

PPK-LIPI 2012, *Ketahanan Pangan. Seri Penelitian PPK-LIPI No. 56/2012.* Jakarta: Pustlit Kependudukan\_LIPI.

Purwaningsih, Dkk. 2010. "Analisis Permintaan Pangan rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan Di Provinsi

- Sulawesi utara (analisis data susenas 2008)*": Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Jurnal Eko- Regional FE UNSOED, Volume 5, Nomor 1, Maret 2010.
- Rivai, Veithzal 2004, *Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono 2005, *Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: LB Laks Bang.
- Sarwono, Sarlito Wirawan 2016, *Konsep Peran Derivasi Dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang P. 2012, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono 1980, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico.
- Suryabrata, Sumadi 2016, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjokroamidjojo, Bintoro 2006, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta, LP3ES.